

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2023



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO

KATA PENGANTAR

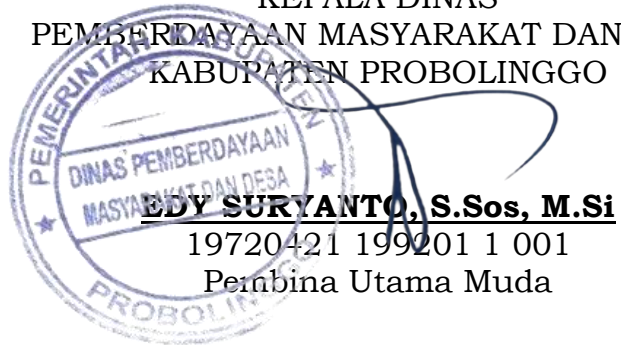
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga ***“Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023”*** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, dengan mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen Perencanaan yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih belum sempurna, sehingga perlu adanya kritik yang sifatnya konstruktif dan masukan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak.

Probolinggo, Januari 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO



EDY SURYANTO, S.Sos, M.Si
19720421 199201 1 001
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	37
BAB V PENUTUP.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Review Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023. Penyusunan Renja 2023 juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Untuk itu perumusan program, dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah daerah, dan program perangkat daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo 2023 yaitu : untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju

berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, yaitu :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan;
4. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo tahun lalu (2022), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2023), analisis kinerja pelayanan

perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo, serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo Tahun 2023.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Probolinggo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Program Penataan Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	80	70	100	70,62	70,62	80 %	220,62	2,76
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	49	43	100	77,89	77,89	49	169,89	3,47
	Program Administrasi Pemerintahan	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	80	61	100	60,88	60,88	80	201,88	2,52

				Desa									
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan	72	62	100	86,16	86,16	72	220,16	3,06
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sakip Dinas PMD	82	87	100	95	95	82	264	3,22

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	-	68 %	69 %	70 %	71 %	96,9	77,17 %	67,22	43	-	-	-
2	Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif	-	-	48,7 %	48,8 %	48,9 %	49 %	74,17	99,80 %	68,84	62	-	-	-
3	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akuntabel	-	-	80 % (240 Desa)	85 % (256 Desa)	90 % (273 Desa)	95 % (291 Desa)	96,23	66,3 %	43,05	70,93	-	-	-
4	Nilai Sakip Dinas DPMD	-	-	81 %	81 %	82 %	82 %	72,03 %	97,65	89,47	87,58	-	-	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
1.	Meningkanya Kemandirian Desa	Index Desa Membangun	Jumlah IDM di bagi 325 Desa	Nilai	0,74	0,73	98,65	0,76	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023****Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa****Kabupaten Probolinggo**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENATAAN DESA	DEsa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	60 %	45.000.000	PROGRAM PENATAAN DESA	Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	60 %	50.000.000	
2	Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa	80 %	45.000.000	Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa	80 %	50.000.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DEsa	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	50 %	70.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	50 %	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	50 %	75.000.000	
4	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	49 %	70.000.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	49 %	75.000.000	
5	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Desa	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	84 %	6.898.848.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Desa	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	84 %	6.445.648.000	
6	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DEsa	Persentase Desa yang dibina dan mendapat pengawasan	87 %	6.898.848.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	Persentase Desa yang dibina dan mendapat pengawasan	87 %	6.445.648.000	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Desa	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan	72 %	490.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	DEsa	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan	72 %	500.000.000	

	ADAT					HUKUM ADA					
8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	72 %	490.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	72 %	500.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPMD	SAKIP Dinas PMD	82 %	4.705.073.840	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPMD	SAKIP Dinas PMD	82 %	4.552.906.840	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPMD	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tepat w	82 %	35.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPMD	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tepat w	82 %	35.000.000	
	Admimistrasi Keuangan Daerah	Sekretariat DPMD	Prosentase Admimistrasi Keuangan Daerah terselesaikan tepat waktu	82 %	3.484.074.000	Admimistrasi Keuangan Daerah	Sekretariat DPMD	Prosentase Admimistrasi Keuangan Daerah terselesaikan tepat waktu	82 %	3.452.814.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPMD	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82 %	55.200.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sekretariat DPMD	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82 %	93.460.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPMD	ProsentaseAdminist rasi Umum Perangkat Daerah	82 %	394.318.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat DPMD	ProsentaseAdministrasi Umum Perangkat Daerah	82 %	283.701.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Sekretariat DPMD	Prosentase layanan jasa penunjang urusan sesuai dengan SOP	82 %	534.041.840	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Sekretariat DPMD	Prosentase layanan jasa penunjang urusan sesuai dengan SOP	82%	519.041.840	

	Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	Sekretariat DPMD	Prosentase Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD sesuai dengan SOP	82 %	202.440.000	Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	Sekretariat DPMD	Prosentase Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD sesuai dengan SOP	82 %	168.890.000	
--	---	---------------------	---	------	-------------	---	---------------------	--	------	-------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024**

Kabupaten Probolinggo

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan Kelembagaan BUMDes	Desa Kedung Rejoso Kec Kotaanyar	Prosentase Meningkatnya kelembagaan BUMDes	1	Desa
2	Hibah urusan pemberdayaan urusan masyarakat melalui gerakan PKK	Kraksaan	Prosentase Meningkatnya kelembagaan PKK	1	Dokumen

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

- f. Pengembangan daerah terisolir,
 - g. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Probolinggo

Nama Perangkat Daerah : Dinas pemberdayaa Masyarakat dan Desa

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Probolinggo	81 %	50.000.000	Pajak rokok		81 %	45.000.000
2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa	Probolinggo	81 %	50.000.000	Pajak rokok		81 %	45.000.000
				Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	275 Desa	20.000.000	Pajak rokok		275 Desa	20.000.000
				Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat kewenangan Kabupaten/Kota	Desa	1 Laporan	25.000.000	Pajak rokok		1 Laporan	25.000.000
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjaln	Probolinggo	49 %	75.000.000	Pajak rokok		49 %	70.000.000

				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	Probolinggo	49 %	75.000.000	Pajak rokok		49 %	70.000.000
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Desa	10 Dokumen	25.000.000	Pajak rokok		10 Dokumen	25.000.000
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten	Desa	10 Dokumen	25.000.000	Pajak rokok		10 Dokumen	25.000.000
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Pedesaan	Desa	20 Dokumen	20.000.000	Pajak rokok		20 Dokumen	20.000.000
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	Probolinggo	87 %	6.898.848.000	DAU		87 %	6.898.848.000
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dibina dan mendapat pengawasan	Probolinggo	87 %	6.898.848.000	DAU		87 %	6.898.848.000
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	325 Dokumen	300.000.000	DAU		325 Dokumen	300.000.000
				Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas penyusunan produk hukum desa	Desa	675 Dokumen	20.000.000	DAU		675 Dokumen	20.000.000
				Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Dokumen Fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa	Desa	650 Dokumen	25.000.000	DAU		650 Dokumen	25.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	325 Dokumen	5.253.848.000	DAU		325 Dokumen	5.253.848.000
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Desa	325 Desa	95.000.000	DAU		325 Desa	95.000.000
				Pembinaan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa	Desa	50 Dokumen	125.000.000	DAU		50 Dokumen	125.000.000
				Penyelenggaraan Pemilihan,	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan,	Desa	4 Laporan	500.000.000	DAU		4 Laporan	500.000.000

				Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa							
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Desa	975 Dokumen	25.000.000	DAU		975 Dokumen	25.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Desa	325 Dokumen	30.000.000	DAU		325 Dokumen	30.000.000
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Desa	325 Orang	30.000.000	DAU		325 Orang	30.000.000
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa Yang diFasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	52 Desa	420.000.000	DAU		52 Desa	420.000.000
				Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Desa	2 Dokumen	75.000.000	DAU		2 Dokumen	75.000.000
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADA	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan	Probolinggo	74 %	490.000.000	DAU		74 %	490.000.000
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	Probolinggo	74 %	490.000.000	DAU		74 %	490.000.000

				Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Desa	9 Dokumen	10.000.000	Pajak Rokok		9 Dokumen	10.000.000
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa	50 Dokumen	20.000.000	Pajak Rokok		50 Dokumen	20.000.000
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang di tingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Desa	75 Lembaga	25.000.000	Pajak Rokok		75 Lembaga	25.000.000
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Desa	75 Lembaga	20.000.000	Pajak Rokok		75 Lembaga	20.000.000
				Fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil	Desa	1 Dokumen	25.000.000	Pajak Rokok		1 Dokumen	25.000.000

				Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa							
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa	1 Laporan	10.000.000	Pajak Rokok		1 Laporan	10.000.000
				Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong	Desa	1 Laporan	10.000.000	Pajak Rokok		1 Laporan	10.000.000
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Desa	1 Dokumen	350.000.000	Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya		1 Dokumen	350.000.000
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar Keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat	Desa	50 Keluarga	10.000.000	Pajak Rokok		50 Keluarga	10.000.000
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing	Desa	50 Keluarga	10.000.000	Pajak Rokok		50 Keluarga	10.000.000
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SAKIP Dinas PMD	DPMD	5 %	4.705.073.840	DAU		5 %	4.705.073.840

				Kabupaten/Kot								
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran tepat wakt	DPMD	5 %	35.000.000	DAU		DPMD	35.000.000
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	DPMD	8 Dokumen	35.000.000	DAU		8 Dokumen	35.000.000
				Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Tersusun	DPMD	5 %	3.484.074.000	DAU		5 %	3.484.074.000
				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DPMD	25 orang/bulan	3.432.814.000	DAU		25 orang/bulan	3.432.814.000
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	DPMD	1 Dokumen	48.260.000	DAU		1 Dokumen	48.260.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD	1 Laporan	3.000.000	DAU		1 Laporan	3.000.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	DPMD	5 %	55.200.000	DAU		5 %	55.200.000
				Koordinasi dan Pelaksanaan sistem infomasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan sistem infomasi Kepegawaian	DPMD	13 Dokumen	55.200.000	DAU		13 Dokumen	55.200.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	5 %	408.951.000	DAU		5 %	408.951.000
				Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan	DPMD	7 Paket	116.473.100			7 Paket	116.473.100

				Peralatan dan Perlengkapan kantor	dan Perlengkapan kantor yang disediakan							
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan	DPMD	1Paket	3.943.400			1Paket	3.943.400
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket barang dan pengandaan yang disediakan	DPMD	1 paket	22.295.000			1 paket	22.295.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak tersedia	DPMD	2 Paket	23.941.500			2 Paket	23.941.500
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMD	1 Laporan	242.298.000			1 Laporan	242.298.000
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan sesuai dengan SOP	DPMD	5 %	534.041.840			5 %	534.041.840
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan.	DPMD	1 Laporan	18.000.000			1 Laporan	18.000.000
				Penyediaan jasa pelayanan umum kanto	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	DPMD	12 Laporan	516.041.840			12 Laporan	516.041.840
				Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	Prosentase Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD sesuai dengan SOP	DPMD	5 %	202.440.000			5 %	202.440.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan,, padak dan perizinan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan	DPMD	18 Unit	10.000.00			18 Unit	10.000.00

				kendaraan dinas operasional atau lapangan.	pajak dan perizinannya.							
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	DPMD	24 Unit	192.440.000			24 Unit	192.440.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Probolinggo yang harus diselaraskan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah:

Unsur : Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

I. Program : Program Penataan Desa

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
- Fasilitasi Tata Wilayah Desa

II. Program : program peningkatan kerjasama desa

1. Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama antar Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

III. Program : Program Administrasi Pemerintahan

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa.
- Sub Kegiatan Pembinaan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sub Kegiatan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

IV. Program : Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif APBD	Catatan Penting
1	2	3	4
	Program Penataan Desa	45.000.000	PAJAK ROKOK
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	45.000.000	PAJAK ROKOK
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	20.000.000	PAJAK ROKOK
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	25.000.000	PAJAK ROKOK
	program peningkatan kerjasama desa	70.000.000	PAJAK ROKOK
	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	70.000.000	PAJAK ROKOK

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	PAJAK ROKOK
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	PAJAK ROKOK
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20.000.000	PAJAK ROKOK
Program Administrasi Pemerintahan	6.898848.000	DAU
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.898848.000	DAU
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	300.000.000	DAU
Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	20.000.000	DAU
Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	25.000.000	DAU
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.253.848.000	DAU
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	95.000.000	DAU

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	500.000.000	SILPA
Sub Kegiatan Pembinaan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa	125.000.000	DAU, SILPA
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	25.000.000	DAU
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30.000.000	DAU
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	30.000.000	DAU
Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	450.000.000	PAJAK ROKOK
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	75.000.000	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	490.000.000	PAJAK ROKOK
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat	490.000.000	PAJAK ROKOK

Hukum adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.		
Sub Kegiatan Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	10.000.000	PAJAK ROKOK
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000	PAJAK ROKOK
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.000.000	PAJAK ROKOK
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10.000.000	PAJAK ROKOK
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	25.000.000	PAJAK ROKOK

Asli Desa.		
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000	PAJAK ROKOK
Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	350.000000	SILPA
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10.000.000	PAJAK ROKOK
Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10.000.000	PAJAK ROKOK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.719706840	DAU
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	35.000.000	DAU
Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	DAU
Kegiatan Administrasi	3.484.074.000	DAU

Keuangan Perangkat Daerah		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.432.814.000	DAU
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48.260.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	DAU, PAJAK ROKOK
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.200.000	DAU
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	55.200.000	DAU
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.318.000	DAU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.840.100	DAU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.943.400	DAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.295.000	DAU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33941.500	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.298.000	DAU
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.041.840	DAU

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	516.041.840	DAU, Dana Bagi Hasil, Pajak rokok
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	202.440.000	PAJAK ROKOK
	Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	PAJAK ROKOK
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.440.000	PAJAK ROKOK

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo ini disusun memperhatikan penyusunan RKPD Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) juga memperhatikan program dan prioritas sehingga Perangkat Daerah (PD) akan tepat sasaran dalam menjalankan Rencana Kerja (Renja) satu tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, dibutuhkan peran aktif para stakeholder sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Kerja (Renja) yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan Perangkat Daerah (PD), dan tidak lepas dari kemampuan aparatur pelaksana program serta sarana dan prasarana yang tersedia dan partisipasi semua pihak yang terkait.

Probolinggo, Januari 2023
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PROBOLINGGO



EDY SURYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
19720421 199201 1 001

